

## BAB II

### EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

#### 2.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur 2009-2014 memuat Visi Pemerintah Propinsi Jawa Timur yaitu : *“Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

Visi 5 (lima) tahun kedepan ini dijabarkan melalui misi “Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, bukan untuk segelintir orang tertentu. Adapun kemakmuran Jawa Timur diarahkan untuk *“Agawe Wong Cilik Bisa Melu Gemuyu”*.

Selanjutnya, untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, dilaksanakan dengan 4 (empat) strategi yaitu:

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri;
2. Keberpihakan kepada masyarakat miskin (*pro poor*);
3. Pengarusutamaan gender ;
4. Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, melalui, terutama, pengembangan agroindustri/agrobisnis.

Berdasarkan pada visi, misi dan strategi pembangunan tersebut, disusun 9 (Sembilan) agenda utama pembangunan daerah Jawa Timur Tahun 2009-2014 sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin;
2. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik;
3. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis,

serta

- serta pembangunan dan penyediaan infrastruktur pertanian dan pedesaan;
4. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang;
  5. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik menuju pelayanan prima;
  6. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial;
  7. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender;
  8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia;
  9. Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi social ekonomi dampak lumpur panas Lapindo.

## 2.2. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

### 2.2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Utama Pembangunan dan Kinerja indikator Makro Ekonomi dan Sosial Penting Lainnya

Sebagaimana amanat Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2009 tentang RPJMD 2009-2014, kinerja pembangunan Jawa Timur tahun 2010 diukur berdasarkan pada 5 (lima) indikator makro yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Disparitas Wilayah, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk serta Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 2.1  
MATRIKS PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2008		TARGET					
		TARGET	CAPAIAN	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	5,6	6,42	6,20 - 6,40	6,00 - 6,20	5,80 - 6,00	5,60 - 5,80	5,40 - 5,60	5,20 - 5,40
2.	Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk (%)	15,9	16,97	16,50 - 16,90	15,50 - 16,50	15,00 - 15,50	14,50 - 15,00	14,00 - 14,50	13,50 - 14,00
3.	Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2000 (%)	6,3	5,90	4,00 - 4,50	4,00 - 4,50	5,00 - 5,50	5,00 - 5,50	5,50 - 6,00	5,50 - 6,00
4.	Indeks Disparitas Wilayah	101	115,33	115,10 - 115,30	114,70 - 115,10	114,40 - 114,70	114,10 - 114,40	113,80 - 114,10	113,50 - 113,80
5.	Indeks Pembangunan Manusia	66	68,92	68,90 - 69,00	69,00 - 69,50	69,50 - 69,90	69,90 - 70,10	70,10 - 70,50	70,50 - 71,00

Kelima

Kelima indikator tersebut merupakan representasi dari kinerja 9 (sembilan) agenda pembangunan yang dicapai secara bertahap dan berkelanjutan. Agar lebih terfokus kepada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut diatas maka analisa kinerja pembangunan Jawa Timur tahun sebelumnya, disajikan menurut urutan target Kinerja Pembangunan Tahun 2010 yaitu :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka;
2. Pertumbuhan Ekonomi,
3. Indeks Disparitas Wilayah,
4. Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk;
5. Indeks Pembangunan Manusia.

Serta beberapa hasil evaluasi indikator pembangunan lainnya yang dipandang penting antara lain :

#### **2.2.1.1. Evaluasi Kinerja Indikator Utama Pembangunan**

##### **a. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Perkembangan jumlah penganggur di Jawa Timur tidak lepas dari adanya perubahan demografi. Hingga tahun 2008, persoalan penganggur masih merupakan prioritas pembangunan. Salah satu penyebab masalah pengangguran yang tidak dapat dipungkiri adalah pola pikir pada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa bekerja itu harus di instansi pemerintah atau perusahaan. Sementara di kedua lini sektor tersebut, kesempatan kerja yang tersedia masih sangat terbatas. Selain itu pula kendala lainnya yang masih dihadapi dalam bidang ketenagakerjaan adalah rendahnya kualitas tenaga kerja yang tersedia.

Upaya-upaya yang telah dilakukan di atas, pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran. Dari hasil pendataan yang dilakukan BPS melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), selama 3 tahun terakhir (2006 – 2008) jumlah penganggur di Jawa Timur menunjukkan penurunan yang cukup berarti. Tahun 2008, jumlah penganggur turun sekitar 378 ribu orang.

Seiring adanya krisis global pada tahun 2008, ternyata belum memberikan dampak langsung terhadap pengurangan tenaga kerja/PHK. Akan tetapi dampak yang mulai dirasakan adalah penurunan omzet oleh sebagian besar perusahaan. Dampak tersebut dapat diminimalkan dengan

jalan

jalan mengurangi jam kerja oleh perusahaan. Dari informasi Dinas tenaga kerja Jawa Timur, jumlah kasus PHK yang ditangani Pengadilan Negeri Surabaya selama tahun 2008 sebanyak 227 kasus atau sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sekitar 201 kasus.

Penurunan jumlah penganggur yang cukup besar hendaknya masih perlu diwaspadai, mengingat angka setengah penganggur masih cukup tinggi. Angka setengah penganggur memberikan indikasi bahwa penduduk yang masuk dalam kategori bekerja masih belum produktif atau waktu yang digunakan untuk bekerja berada di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Umumnya mereka bekerja sebagai pekerja bebas atau pekerja keluarga pada sektor pertanian maupun non pertanian.

**Tabel 2.2**  
**Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan di Jawa Timur**  
**Tahun 2004 – 2008**

No.	Uraian	2004	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penduduk Usia Kerja	27.199.219	28.118.132	28.571.533	29.160.338	29.111.564
2.	Angkatan Kerja	18.822.218	19.335.890	19.244.959	20.117.924	20.178.590
3.	Kesempatan Kerja/bekerja	17.374.955	17.689.834	17.669.660	18.751.421	1.366.503
4.	Pencari Kerja/Penganggur					
	- Konsep lama	1.011.170	1.081.897	1.051.868	1.142.351	913.410
	- Konsep baru	1.447.263	1.646.056	1.575.299	1.366.503	1.296.313
5.	Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)					
	- Konsep lama	5,72	5,82	5,74	5,68	4,53
	- Konsep baru	7,69	8,51	8,19	6,79	6,42
6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,59	68,77	67,36	68,99	69,31
7.	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	92,31	91,49	91,81	93,21	93,58

*Sumber : Sakernas 2004 – 2008, BPS Jatim*

Sebaran jumlah penganggur menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur relatif heterogen, dengan besaran angka TPT berkisar antara 2,93 % ( Kab. Bondowoso) hingga 12,72 % (Kota Madiun). Sebagian besar TPT pada kabupaten/kota menunjukkan penurunan pada tahun 2007 – 2008. Untuk penurunan TPT > 1 persen pada tahun 2007 – 2008, terdapat pada 11 kabupaten/kota, yaitu : Kab. Ponorogo (-1,03 %), Kab. Trenggalek (-1,19 %), Kab. Kediri (-1,10 %), Kab. Jember (-1,09 %), Kab. Situbondo (-1,55 %), Kab. Jombang (-1,19 %), Kab. Madiun (-1,67 %), Kab. Magetan (-1,03 %), Kota Blitar (-1,27 %), Kota Madiun (-2,73 %), Kota Batu (-1,41 %).

**Tabel 2.3**

Tabel 2.3  
Jumlah Penganggur dan Setengah Penganggur di Jawa Timur  
Tahun 2004 – 2008

No.	Rincian	2004	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penganggur	1.447.263	1.646.056	1.575.299	1.366.503	1.296.313
	- Laki-Laki	745.947	862.120	813.611	789.630	727.983
	- Perempuan	701.316	783.936	761.688	576.873	568.330
2	Setengah Penganggur	6.256.192	6.497.747	6.129.950	5.827.223	6.247.875
	- Laki-Laki	3.150.199	3.265.338	3.218.206	2.962.902	3.029.701
	- Perempuan	3.105.993	3.232.409	2.911.744	3.158.995	3.218.174

2.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dilihat dari PDRB ADHK 2000 selama periode 2003-2008 adalah berturut-turut sebesar 4,78 persen (2003); 5,83 persen (2004); 5,84 persen (2005); 5,80 persen (2006); 6,11 persen (2007); dan 5,90 persen (2008).

Pertumbuhan ekonomi dari tahun 2003 – 2005 tampak terus meningkat, tetapi sejak kenaikan harga BBM pada tahun 2005 sebagai dampak pengurangan subsidi BBM, pertumbuhan ekonomi menjadi melambat di tahun 2006, terutama akibat dari efek *multiplier* kenaikan BBM. Melambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2006 juga diakibatkan oleh naiknya cukai rokok.

Pada tahun 2007, pertumbuhan ekonomi kembali menggeliat, hingga mampu tumbuh 6,11 persen lebih tinggi dibanding empat tahun sebelumnya. Tetapi kondisi itu tidak bertahan lama, karena pada akhir tahun 2007 hingga kuartal kedua tahun 2008, kenaikan harga minyak dunia meningkat hingga mencapai 147 dollar AS per barrel.

Secara perlahan, kenaikan itu juga berdampak pada kenaikan BBM di dalam negeri yang pada akhirnya mendorong pergerakan harga barang dan jasa ikut menjadi naik. Kondisi ini terus berlanjut dengan terjadinya krisis finansial yang dimulai dari kasus *subprime mortgage* di Amerika Serikat, hingga meluas di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Bagi efek domino, Jawa Timur juga terkena imbas, sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 melambat kembali hanya mencapai 5,90 persen.

Ditinjau

Ditinjau dari pertumbuhan sektoral, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2003 mencapai 4,78 persen. Pertumbuhan tersebut sebagian besar didukung oleh pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 15,52 persen; sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang mencapai sebesar 7,92 persen; sektor pengangkutan sebesar 5,78 persen. Sektor industri sebagai pendukung utama perekonomian Jawa Timur pada tahun 2003 mampu tumbuh sebesar 4,46 persen.

**Tabel 2.4**  
**Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur**  
**Tahun 2003 – 2008**

Keterangan		2003	2004	2005	2006	2007*)	2008**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	300.610	341.065	403.392	470.627	534.919	621.582
2.	PDRB ADHK 2000 (Miliar Rupiah)	228.884	242.229	256.375	271.249	287.814	304.799
3.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,78	5,83	5,84	5,80	6,11	5,90

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur  
Keterangan: \*) Angka Diperbaiki  
\*\*) Angka Sementara

Selanjutnya pada tahun 2004 perekonomian ekonomi Jawa Timur mulai menembus pertumbuhan 5 persen, yaitu menjadi 5,83 persen. Pertumbuhan pada tahun 2004 tersebut didorong oleh seluruh sektor ekonomi yang semuanya mengalami pertumbuhan, terutama sektor listrik, gas, dan air bersih tumbuh sebesar 14,86 persen; sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 9,25 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,77 persen; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 5,94 persen; serta sektor industri yang tumbuh sebesar 5,28 persen. Sedangkan untuk sektor-sektor lainnya rata-rata masih mengalami pertumbuhan, meskipun tidak lebih dari 4 persen.

Dibanding data tahun 2004, pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi sedikit terlihat mengalami stagnasi, dengan tumbuh sebesar 5,84 persen. Penyebab relatif stagnannya pertumbuhan pada tahun 2005 tersebut adalah akibat kenaikan harga BBM dan cukai rokok selama tahun 2005. Semua sektor mengalami pertumbuhan, terutama sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 9,32 persen. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang menjadi pendukung utama pertumbuhan melambat dengan tumbuh 9,15 persen. Sedangkan sektor listrik, gas, dan air bersih, dan sektor pengangkutan dan komunikasi juga ikut tumbuh melambat sebesar 6,18 persen dan 5,00

persen

persen. Demikian juga sektor industri juga mulai melambat kembali dengan hanya tumbuh sebesar 4,61 persen.

Selanjutnya pada tahun 2006 perekonomian Jawa Timur nampak sedikit melambat dengan hanya tumbuh sebesar 5,80 persen. Dampak kenaikan BBM tahun 2005 mulai dirasakan oleh sektor industri dan sektor konstruksi, yang mulai melemah dengan tumbuh sebesar 3,05 persen dan 1,42 persen. Sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas, dan air bersih serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan juga melambat dibanding tahun sebelumnya, dengan tumbuh masing-masing sebesar 8,58 persen, 4,07 persen dan 7,46 persen. Kontribusi terbesar pertumbuhan pada tahun 2006 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertambangan dan penggalian, yang rata-rata tumbuh sebesar 9,62 persen, dan 8,58 persen.

Pengaruh kenaikan harga BBM pada tahun 2006 sedikit demi sedikit pada tahun 2007 mulai berkurang. Sehingga pada tahun 2007 perekonomian Jawa Timur nampak meningkat dengan tumbuh sebesar 6,11 persen. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan sangat tinggi pada tahun 2007 adalah sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan pertumbuhan sebesar 11,81 persen, 10,44 persen dan 8,39 persen. Sedangkan sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar kedua, hanya mampu tumbuh 4,64 persen.

Pada tahun 2008 ekonomi tumbuh sebesar 5,90 persen, dan tercatat sektor pertambangan dan penggalian masih mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 9,26 persen, diikuti perdagangan, hotel dan restoran (8,27 persen); keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (8,05 persen); serta angkutan dan komunikasi (7,20 persen). Sektor industri pengolahan dan pertanian yang memberikan kontribusi terbesar kedua dan ketiga setelah sektor perdagangan, hotel, dan restoran, hanya mampu tumbuh masing-masing sebesar 4,39 persen dan 3,12 persen.

Realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2008 ini meleset dari yang ditargetkan sebesar 6,3 persen. Seperti telah disebutkan di-atas, krisis finansial global, serta krisis energi yang terjadi pada tahun 2008 menjadi kendala terberat bagi sektor ekonomi, terutama sektor industri pengguna listrik terbesar serta mengandalkan bahan baku impor dari luar negeri.

#### 2.2.1.3. Disparitas

2.2.1.3. Disparitas Wilayah

Kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sangat dipengaruhi oleh kreatifitas Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan segala potensi yang ada untuk meningkatkan *output* daerah. Kondisi tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat setempat.

Kenaikan harga BBM di tahun 2005 menyebabkan perubahan struktur ekonomi secara nasional, sehingga mendorong tingginya laju inflasi di tahun 2005 yang sekaligus berdampak terhadap kemampuan daya beli masyarakat secara umum. Melemahnya daya beli masyarakat yang bervariasi akan mengakibatkan kesenjangan antar wilayah.

**Tabel 2.5**  
**Koefisien Varians Williamson PDRB**  
**Per Kapita Jawa Timur**  
**Tahun 2004-2008**

Tahun	Indeks Vw	Perubahan
(1)	(2)	(3)
2004	114,54	1,12121
2005	116,25	1,49293
2006	116,00	-0,21505
2007 <sup>*)</sup>	115,38	-0,53448
2008 <sup>**)</sup>	115,61	0,19934

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur  
Keterangan: <sup>\*)</sup> Angka Diperbaiki  
<sup>\*\*)</sup> Angka Sementara

Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Disparitas Williamson pada tahun 2005 yang sebesar 116,25 atau mengalami peningkatan sebesar 1,49 persen dibanding dengan tahun 2004. Pada tahun 2006 nilainya sebesar 116,00 atau terjadi penurunan sebesar 0,22 persen, pada tahun 2007 indeks mencapai 115,38 atau mengalami penurunan sebesar 0,53 persen dibanding data tahun 2006. Nilai indek Disparitas Williamson tahun 2008 sebesar 115,61 atau mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen.

Adanya kenaikan harga BBM mulai 24 Mei 2008 serta terjadi krisis global tetap menyebabkan adanya tingkat kesenjangan di Jawa Timur, namun tidak separah seperti yang terjadi pada tahun 2005 yang sama-sama ada kenaikan BBM, hal ini diduga karena perekonomian Indonesia dan khususnya Jawa Timur sudah relatif stabil dibandingkan kondisi pada tahun 2005. Selain itu kenaikan pada tahun 2008 tidak berlangsung lama, karena pada akhir tahun 2008 harga BBM kembali mengalami penurunan secara bertahap.

2.2.1.4. Prosentase



2.2.1.4. Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk;

Pada tahun 2008 penduduk miskin (16,97 persen) mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan data tahun 2007 yaitu turun sebesar 1,92 persen poin.

Penduduk miskin di Jawa Timur sebagian besar masih termasuk dalam kategori 2 yaitu sekitar 13,47 persen, namun demikian penurunan persentasenya setiap tahun lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok penduduk kategori 3 (sangat miskin). Hal ini dapat dimaklumi mengingat permasalahan untuk kelompok penduduk sangat miskin lebih kompleks, sehingga penanganannya relatif lebih lama.

**Tabel 2.6**  
**Persentase Perkembangan Penduduk Miskin Menurut Klasifikasi Di Jawa Timur Tahun 2006 – 2008**

Klasifikasi Miskin	2006	2007*	2008**	Perubahan	
				'06 - '07	'07 - '08
Miskin (Kategori 2)	15,77	14,84	13,47	0,93	-1,37
Sangat Miskin (Kategori 3)	4,12	4,05	3,50	0,07	-0,45
Jumlah (persen)	19,89	18,89	16,97	1,00	-1,92

Sumber : BPS Jawa Timur  
Keterangan :\*) Angka Diperbaiki  
\*\*) Angka Sementara

Pada tahun 2003, tingkat kemiskinan di Jawa Timur adalah 19,52 persen. Kemudian pada tahun 2004 turun menjadi 19,10 persen sebelum akhirnya naik kembali menjadi 22,51 persen pada tahun 2005. Kenaikan harga BBM pada tahun 2005 secara tajam telah memberikan dampak negatif khususnya bagi masyarakat yang berada diambang kemiskinan, karena sebagian besar dari mereka menjadi miskin. Tetapi pemerintah telah mengantisipasi hal ini dengan melakukan berbagai program pengentasan kemiskinan, diantaranya penyaluran BLT pada rumah tangga miskin. Sehingga persentase penduduk miskin pada tahun 2006 turun kembali menjadi 19,89 persen, atau dapat dilihat pada gambar berikut.

Dari deretan data tersebut, terlihat bahwa meskipun masih tinggi, tetapi capaian tingkat kemiskinan di Jawa Timur dari tahun ke tahun berada jauh dibawah target yang ditetapkan oleh pemerintah pada periode tahun 2003-2005. Pada tahun 2006 kemiskinan mencapai sebesar 19,89 persen, walaupun mengalami penurunan, tapi secara kuantitas masih lebih tinggi dari target yang ditetapkan pemerintah.

Dampak

Dampak negatif kenaikan harga BBM mungkin masih terasa pada daya beli masyarakat. Sedangkan pada Tahun 2007, persentase jumlah penduduk miskin kembali menurun menjadi sebesar 18,89 persen. Hal ini disebabkan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada Tahun 2007. Diakhir tahun 2008 penduduk miskin menurun lagi menjadi 16,97 persen, turun cukup signifikan yaitu sebesar -1,92 dibanding penurunan tahun 2007 sebesar 1,00.

#### **2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Secara umum angka IPM di Jawa Timur (versi Jawa Timur) selama periode 2003 - 2008 menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2003 IPM Jawa Timur mencapai 63,66; meningkat pada tahun 2004 menjadi 64,49, dan selanjutnya meningkat masing-masing 66,84 (2005); 66,87(2006); 68,06 (2007); dan 68,92 (2008).

Secara umum kenaikan IPM pada tahun 2006 disebabkan membaiknya kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Level IPM Jawa Timur pada tahun 2006 mulai bergeser dari level menengah bawah menjadi menengah atas. Capaian IPM pada tahun 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008 selalu berada diatas target yang ditetapkan pemerintah, yaitu 64,490 ; 66,840 ; 66,870; 68,060; 68,920 dan 66,000.

Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung fluktuatif, IPM tumbuh lebih stabil. Artinya meskipun terjadi pasang surut perkembangan ekonomi, tetapi pembangunan manusia di Jawa Timur lambat-laun mengalami perbaikan yang nyata. Pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi yang sempat melambat dari 6,11 persen pada tahun 2007 menjadi 5,90 persen, akibat naiknya harga minyak dunia yang mencapai 147 dollar AS per barrel, justru IPM yang tercapai pada tahun itu tetap mengalami peningkatan dari 68,06 pada tahun 2007 menjadi 68,92.

Selain itu, kategori terendah IPM-nya juga mengalami peningkatan. Semula IPM terendah sebesar 53,24 pada tahun 2007 menjadi 55,47, sedangkan IPM tertinggi yang tercatat pada tahun 2007 sebesar 75,05; terpecahkan rekor menjadi 76,09 pada tahun 2008.

Dari 38 kabupaten/kota yang dihitung IPMnya, 19 kabupaten/kota mempunyai IPM lebih baik daripada IPM Jawa Timur, sedangkan sisanya sebanyak 19 kabupaten/kota IPMnya berada di bawah IPM Jawa Timur. Pada tahun 2008, IPM tertinggi/terbaik dicapai oleh Kota Surabaya dengan IPM sebesar 76,09, yang pada tahun 2007 menempati peringkat keempat setelah Kota Madiun, Kota Blitar, dan Kota Malang. Dengan demikian Kota Surabaya naik tiga peringkat dari tahun sebelumnya. Sementara peringkat terbawah

dalam

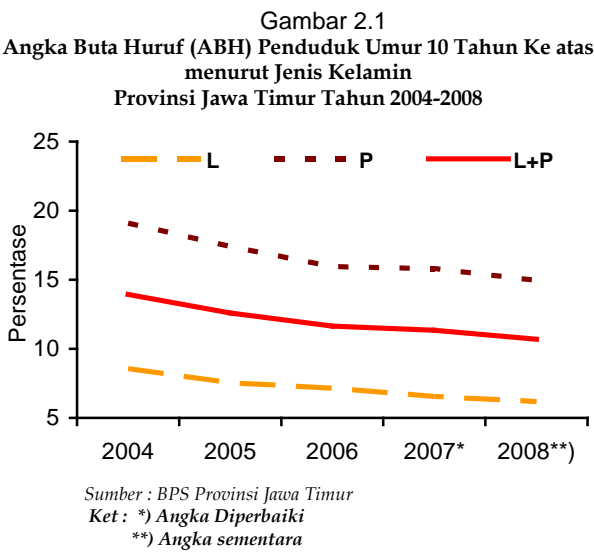
dalam penghitungan IPM masih ditempati Kabupaten Sampang dengan IPM sebesar 55,47. Namun demikian, capaian Kabupaten Sampang pada tahun 2008 ini lebih baik dibanding capaian tahun sebelumnya yang hanya mampu mencapai 53,24.

Sebagai tambahan evaluasi kinerja utama dari Indikator IPM, disajikan data kinerja pendukung sebagai berikut :

a. **Angka Buta Huruf (ABH)**

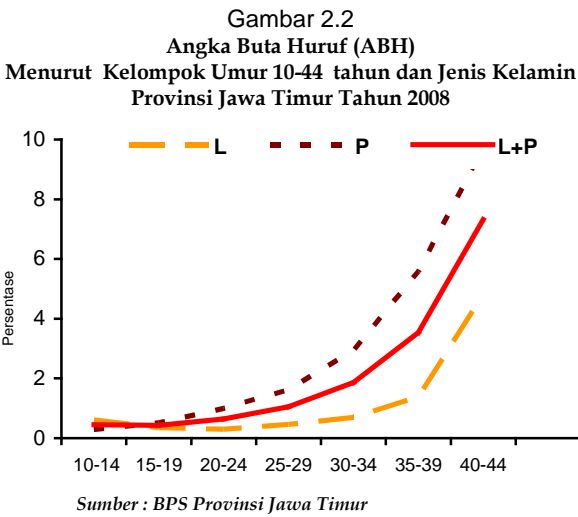
Dalam kurun waktu lima tahun (2004-2008) terjadi penurunan sekitar 3,25 persen poin penduduk berusia 10 tahun ke atas yang buta huruf. Jika tahun 2004 persentase ABH sebesar 13,94 persen, maka di tahun 2008 turun menjadi 10,70 persen. Dengan demikian program pengentasan buta aksara di Jawa Timur telah mengentaskan penduduk buta aksara rata-rata 0,65 persen poin setiap tahun.

Bila dirinci menurut jenis kelamin, memperlihatkan bahwa ABH bagi penduduk laki-laki lebih rendah dibanding ABH penduduk perempuan. Tetapi yang cukup menggembirakan adalah ternyata kesenjangannya dari tahun ke tahun semakin berkurang.



Untuk penduduk usia 10 tahun ke atas pada tahun 2004 terdapat kesenjangan sekitar 10,52 persen poin antara ABH laki-laki dengan ABH perempuan, selanjutnya menurun sehingga menjadi 8,76 persen poin pada tahun 2008. Hal ini juga memberikan gambaran bahwa tingkat pendidikan untuk penduduk

perempuan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kemajuan yang menggembirakan.



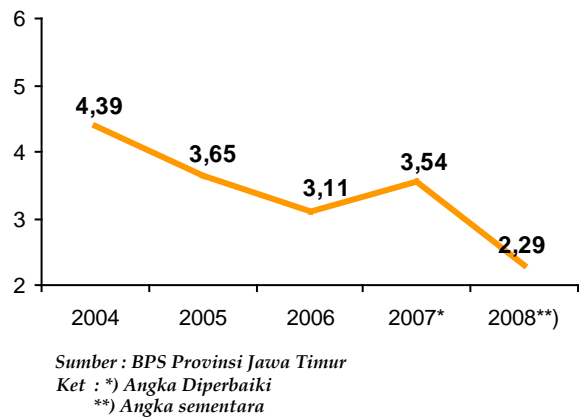
Berdasarkan pengelompokan ABH menurut kelompok umur diketahui bahwa secara umum pada usia 10-29 tahun ABH-nya masih berada di bawah kisaran 2 persen. Pada kelompok ini pula ABH penduduk laki-laki dan perempuan belum terjadi

disparitas

disparitas. Peningkatan ABH secara mencolok mulai terjadi pada kelompok usia 30 tahun ke atas yang diikuti adanya disparitas ABH penduduk laki-laki dan perempuan.

Disparitas ABH di Jawa Timur pada 2008 tidak hanya terjadi pada perbedaan menurut jenis kelamin, namun juga terjadi dari sisi wilayah (pedesaan dan perkotaan). Fenomena yang perlu dicermati adalah terjadinya disparitas ABH menurut kelompok wilayah diawali pada kelompok usia 20 tahun. Di wilayah pedesaan, masih mengalami distorsi mengingat kesadaran mereka tidak seperti yang diharapkan pemerintah. Kejadian ini dapat diperlihatkan dari tingginya disparitas ABH menurut jenis kelamin pada kelompok usia 25-44 tahun.

Gambar 2.3  
Angka Buta Huruf (ABH)  
Penduduk Kelompok Umur 10-44 tahun  
Provinsi Jawa Timur, Tahun 2004-2008



ABH untuk kelompok umur 10-44 di Jawa Timur selama 2004-2008, mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,42 persen poin setiap tahunnya, dari 4,39 persen (2004) menjadi 2,29 persen (2008). Sementara itu, standar kinerja ABH kelompok umur 10-44 tahun yang diagendakan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur pada tahun

2008 sebesar 4,94 persen, ternyata nilai capaian ABH sebesar 2,29 persen. Dengan demikian pada tahun 2008 indikator ABH kelompok umur 10-44 telah terpenuhi bahkan lebih baik dari yang diagendakan.

**b. Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Selama kurun waktu lima tahun (2004-2008) terjadi peningkatan APS usia 7-12 tahun sebesar 1,13 persen poin, dari kisaran 97,43 persen di tahun 2004 menjadi 98,56 persen di tahun 2008. Berdasarkan APS 7-12 tahun di Jawa Timur tahun 2008, rata-rata setiap 100 anak usia 7-12 tahun, 98 anak di antaranya sedang bersekolah, 1 orang lainnya tidak atau belum pernah bersekolah, dan 1 orang yang lain sudah tidak bersekolah lagi, baik karena putus sekolah maupun tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

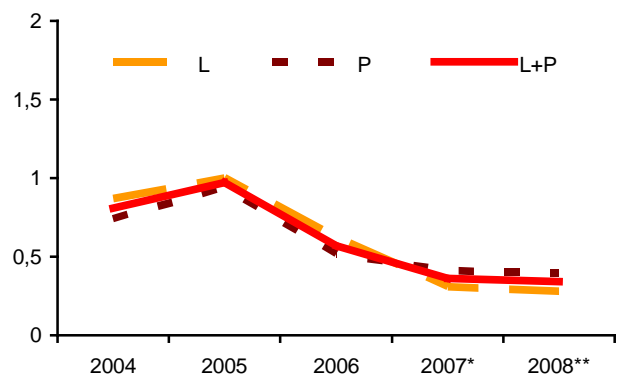
Selanjutnya untuk anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi tampak bahwa selama tahun 2003-2008 memiliki kecenderungan pola yang menurun. Namun bila diperhatikan pola penurunan lebih kelihatan pada

penduduk

penduduk laki-laki, sementara untuk penduduk perempuan dalam kurun 2003-2008 memiliki pola stagnan.

Kemudian untuk anak yang tidak bersekolah lagi, apabila dipilah lebih lanjut akan terdiri dari anak yang sudah menyelesaikan pendidikan di SD tetapi tidak melanjutkan sekolah dan anak yang terpaksa tidak bisa menyelesaikan pendidikan atau *drop out* (DO) karena berbagai alasan. Indikator ini lebih dikenal dengan Angka Putus Sekolah/Angka DO yaitu perbandingan antara anak yang tidak sekolah lagi sebelum menyelesaikan pendidikannya/tidak tamat terhadap jumlah anak usia bersesuaian dikalikan 100. Kondisi idealnya adalah semakin menurun dari tahun ke tahun.

**Gambar 2.4**  
**Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun**  
**Menurut Jenis Kelamin**  
**Provinsi Jawa Timur Tahun 2004 – 2008**



**Sumber :BPS Provinsi Jawa Timur**

Perkembangan Angka Putus Sekolah dalam 5 tahun terakhir memiliki kecenderungan pola menurun, baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Bila pada tahun 2003 terlihat ada perbedaan sekitar 0,66 persen lebih tinggi penduduk laki-laki dibandingkan penduduk perempuan, namun pada tahun 2008 persentase keduanya hampir sama dan cenderung menurun, karena berbagai macam program yang telah dilaksanakan pemerintah provinsi Jawa Timur.

APS untuk usia SLTP pada periode 2004-2008 memiliki kecenderungan peningkatan dari kisaran 84,63 persen pada tahun 2004 menjadi 87,33 persen di tahun 2008. Ini berarti pada tahun 2008, rata-rata setiap 100 penduduk Jawa Timur pada kelompok usia ini, 87 orang di antaranya sedang bersekolah, sementara 13 orang lainnya sudah tidak bersekolah lagi atau belum pernah sekolah.

Hal yang menarik untuk dicermati mengenai APS usia SLTP adalah bila dilihat pola menurut jenis kelamin, APS penduduk perempuan dan laki-laki cenderung berbeda pada periode 2004-2005. Namun pada tahun 2006-2008 persentase keduanya memiliki kisaran yang hampir sama.

Selama 2004-2008 terjadi penurunan pola pada anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah lagi, baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan. Kondisi ini dapat disebabkan karena menurunnya angka putus sekolah SD, tamat SD namun tidak melanjutkan lagi, putus sekolah SLTP, serta sudah menamatkan SLTP namun tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, atau bahkan sudah pernah melanjutkan pendidikan di tingkat SLTA (saat pencacahan berusia 13-15 tahun) namun terputus pendidikannya.

Angka Putus Sekolah pada jenjang Pendidikan usia SLTP, pada tahun 2008 adalah sebesar 0,49 persen, pada periode 2004-2005 terjadi kontradiksi, dimana angka putus sekolah penduduk perempuan mengalami peningkatan, sementara penduduk laki-laki justru mengalami penurunan. Pada periode berikutnya, yaitu tahun 2005-2008 terjadi trend yang sama antara penduduk laki-laki dan perempuan, dimana terjadi penurunan angka putus sekolah usia SLTP secara signifikan.

APS pada penduduk usia SLTA juga memiliki pola meningkat. Bila pada tahun 2004 berada pada kisaran 52 persen, maka pada tahun 2008 menjadi berada pada kisaran 59 persen. Walaupun terjadi peningkatan, namun sangat disayangkan bahwa pendidikan di tingkat SLTA ini hanya dapat dinikmati oleh sebagian orang yang beruntung saja, mengingat peluang seseorang yang berada di Jawa Timur dapat bersekolah di tingkat SLTA hanya sekitar 59 persen pada tahun 2008.

Angka APS diperoleh informasi bahwa, jika ada 100 orang berusia 16-18 tahun, maka 59 anak diantaranya saat ini sedang bersekolah, 41 sudah tidak bersekolah lagi atau belum pernah bersekolah.

Bila dicermati, pola pada kelompok APS 7-12 tahun dan 13-15 tahun, menunjukkan bahwa perbedaan gender tidak terlalu kelihatan, maka pada kelompok usia 16-18 tahun terdapat selisih capaian APS, yaitu penduduk perempuan selalu berada di bawah penduduk laki-laki. Semenjak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 selisihnya selalu berada di atas 3 persen poin.

Faktor yang menjadi sebab rendahnya persentase APS usia SLTA ini adalah masih tingginya penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah lagi (39,98 persen).

Selama

Selama kurun waktu 2004-2008 rata-rata penurunan penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah lagi, hanya berada pada kisaran 1 persen setiap tahunnya. Oleh karena itu diperlukan alternatif program yang lebih efektif lagi dalam upaya meningkatkan besaran APS pada kelompok usia ini, serta mencari solusi dan terutama dalam mereduksi anak yang menamatkan jenjang pendidikan SLTP/ sederajat agar melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pada periode 2003 Angka Putus Sekolah pada jenjang pendidikan SLTA untuk penduduk usia 16-18 tahun menunjukkan kesenjangan, dimana penduduk laki-laki yang putus sekolah lebih besar dibanding penduduk perempuan. Akan tetapi, sejak tahun 2004 sampai 2008, polanya mengarah pada trend yang sama, dimana baik laki-laki maupun perempuan memiliki besaran Angka Putus Sekolah yang hampir sama.

**c. Rasio Murid SMK terhadap SMU**

Rasio murid SMK terhadap SMU (termasuk MA) pada periode tahun pelajaran 2003/2004 - 2006/2007 berada pada kisaran 68, yang berarti rata-rata terdapat 68 murid yang memilih bersekolah di SMK ketika 100 orang yang lain memilih untuk bersekolah di SMU. Pada tahun pelajaran 2007/2008 meningkat menjadi 69,70 persen. Keadaan ini sejalan dengan program pendidikan nasional yang menggalakkan pendidikan kejuruan, dengan tujuan meningkatkan jumlah lulusan pendidikan menengah yang siap bekerja (terampil). Pada tahun pelajaran 2007/2008, rasio murid SMK terhadap SMU bila dilihat menurut kabupaten/kota, ada 13 (tiga belas) kabupaten/kota yang mempunyai rasio diatas 100, yaitu Kabupaten Pacitan, Malang, Sidoarjo, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, serta Kota Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, dan Madiun, seperti dapat dilihat tabel berikut.

**Tabel 2.7**  
**Rasio Murid SMK terhadap Murid SMU Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun Pelajaran 2003/2004 – 2007/2008**

Uraian	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007*	2007/2008**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Murid SMK	416.634	421.299	424.939	462.378	480.264
Murid SMU*	609.936	619.561	612.814	674.272	689.045
Rasio Murid SMK terhadap Murid SMU	0,6831	0,6800	0,6934	0,6857	0,6970

Keterangan : \*) Termasuk Madrasah Aliyah  
Sumber : Diolah dari data Dinas Dikbud Provinsi Jawa Timur

Jumlah murid SMK pada tahun ajaran 2003/2004 berjumlah 416.634 siswa dan pada tahun ajaran 2007/2008 meningkat menjadi 480.264 siswa, yang berarti ada kenaikan sebesar 15,27 persen. Sementara jumlah murid SMU/MA tahun ajaran 2003/2004 berjumlah 609.936 siswa dan pada tahun 2007/2008 menjadi 689.045 siswa, yang berarti naik sebesar 12,97 persen.

Kenaikan jumlah siswa, baik SMK maupun SMU diduga karena keinginan mereka tetap *survive* dalam persaingan di bursa kerja dengan bermodalkan tingkat pendidikan/keahlian yang diperoleh dari tingkat pendidikan formal. Jumlah sekolah SMK dari tahun ajaran 2003/2004-2007/2008 rata-rata setiap tahunnya bertambah 48 sekolah, sedangkan jumlah sekolah SMU/MA dari tahun ajaran 2003/2004-2007/2008 rata-rata setiap tahunnya mengalami penambahan 80 sekolah.

Dari data tersebut terlihat bahwa animo masyarakat untuk memasuki SMK makin besar. Hal ini mungkin disebabkan oleh harapan agar lebih cepat terserap oleh pasar tenaga kerja. Pencapaian rasio murid SMK terhadap SMU selama lima tahun terakhir (2004-2008) selalu lebih besar dari target yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 0,683 ; 0,680 ; 0,693, 0,686 dan 0,697.

#### **d. Kematian Bayi**

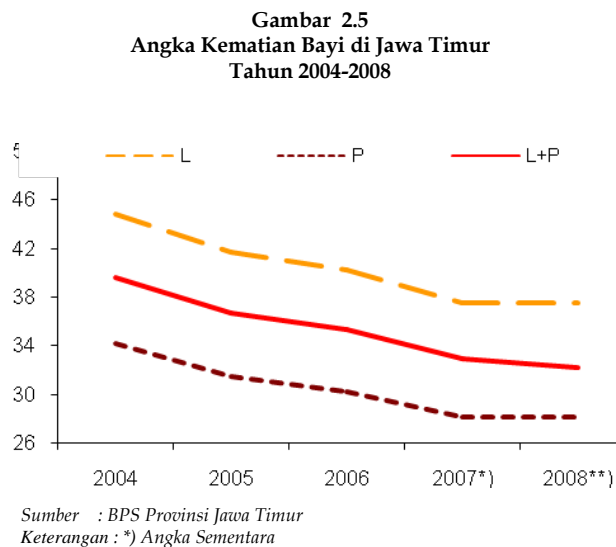
Terjadinya kematian bayi sangat berkaitan dengan kondisi kehamilan ibu, pertolongan persalinan yang aman dan perawatan bayi baru lahir. Penyebab langsung kematian bayi baru lahir adalah penyakit infeksi serta bayi lahir dengan berat badan rendah. Sedangkan beberapa penyebab tidak langsung diantaranya adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan luar, misalnya: tingkat pendidikan ibu yang masih rendah, tingkat sosial ekonomi yang rendah, serta keadaan sosial budaya yang tidak mendukung gizi ibu hamil. Faktor tidak langsung yang bersifat eksternal mencakup keterjangkauan akses sarana dan pelayanan kesehatan pada saat persalinan dan setelah bayi lahir.

Dalam beberapa tahun terakhir AKB di Jawa Timur mengalami penurunan, dari 39 per 1.000 kelahiran hidup (tahun 2004) menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup (tahun 2008). Apabila diperhatikan menurut jenis kelamin, angka kematian bayi pada laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan dengan bayi perempuan, yaitu 37 untuk bayi laki-laki dan 28 bayi perempuan pada tahun 2008. AKB harus terus diupayakan lagi untuk turun, karena menurunnya AKB merupakan gambaran adanya peningkatan dalam kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini merupakan tolak ukur keberhasilan di bidang kesehatan di Jawa Timur.

Turunnya



Turunnya angka kematian bayi ini antara lain didukung karena adanya peningkatan penolong persalinan oleh tenaga medis, keberhasilan program KB, peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah, seiring itupula semakin baiknya pengetahuan masyarakat akan kesehatan.



Sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki AKB lebih baik dari angka yang ditargetkan dalam RPJMD untuk tahun 2008 (36,50). Untuk beberapa daerah masih perlu mendapatkan perhatian lebih serius karena AKB-nya masih cukup tinggi (di atas 50,00), diantaranya adalah Kabupaten Probolinggo,

Sampang, Situbondo, Pasuruan, Bangkalan, Jember, Bondowoso, Pamekasan, Sumenep. Di daerah tersebut menunjukkan persentase penolong persalinan oleh tenaga medis cukup rendah. Tingginya trend AKB di wilayah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di bidang kesehatan perlu ditingkatkan. Selain itu tingginya AKB juga mengidentifikasi bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang perlu dipacu dari sisi pembangunan manusianya.

Angka Kematian Bayi dapat ditekan dengan penanganan yang intensif, baik itu dari faktor eksternal maupun internal. Adapun faktor eksternal antara lain : keberadaan penolong persalinan yang representatif dan kemudahan akses ke tempat pelayanan kesehatan. Sedangkan faktor internal antara lain: melalui pola pemberian ASI dan imunisasi serta perhatian dan perlakuan rumah tangga terhadap bayi.

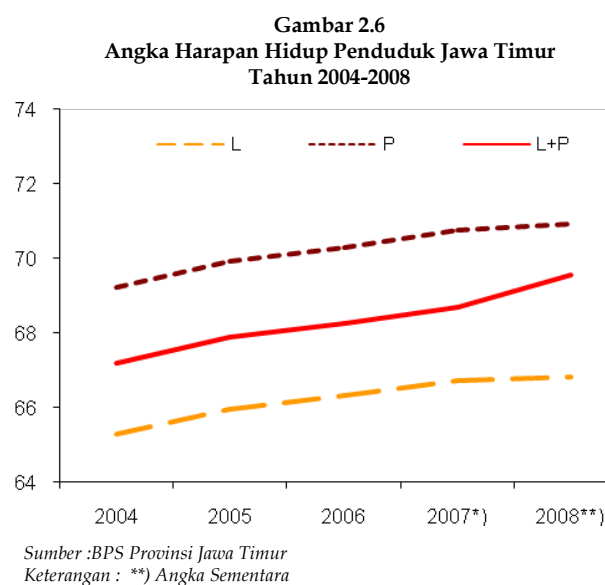
#### e. Angka Harapan Hidup (AHH)

AHH sangat berkaitan erat dengan pembangunan sosial ekonomi suatu wilayah. Keberhasilan program kesehatan dan program sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk di suatu wilayah. Bila pembangunan sosial ekonomi semakin baik, maka

kecenderungannya

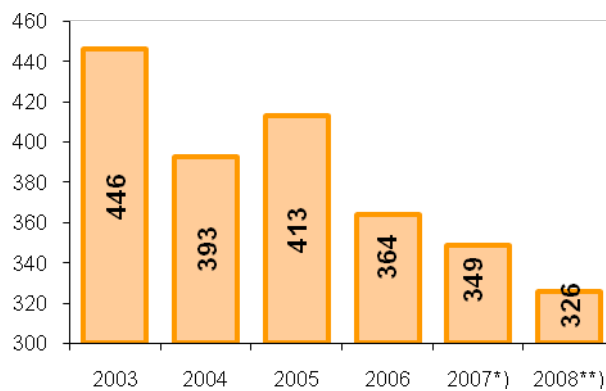
kecenderungannya AHH akan semakin tinggi, atau sebaliknya bila AHH lebih rendah mengindikasikan terjadinya kontradiksi pada beberapa sektor pembangunan sosial ekonomi suatu wilayah. AHH yang rendah di suatu wilayah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya, termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, dan program pemberantasan kemiskinan.

Angka Harapan Hidup penduduk Jawa Timur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang berarti. Pada tahun 2007 AHH penduduk Jawa Timur sebesar 68,69 tahun meningkat menjadi 69,55 tahun pada tahun 2008. Apabila diperhatikan menurut jenis kelamin, umur harapan hidup perempuan dari waktu ke waktu selalu menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 66,81 tahun untuk laki-laki dan 70,91 tahun untuk perempuan pada tahun 2008. Meningkatnya umur harapan hidup ini secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.



Seiring dengan semakin meningkatnya umur harapan hidup, maka perlu diiringi dengan upaya peningkatan kualitas kesehatannya. Sehingga penduduk tersebut dapat hidup lebih lama yang ditunjang kondisi tubuh yang sehat dan tidak menjadi beban bagi penduduk yang lainnya.

Gambar 2.7  
Jumlah Kasus Kematian Ibu Maternal  
Provinsi Jawa Timur, Tahun 2003-2008



Sumber :Dinkes Provinsi Jawa Timur

Keterangan : \*) Angka Diperbaiki

\*\*) Angka Sementara

Apabila diperhatikan menurut kabupaten/kota, sebagian besar wilayah di Jawa Timur (sebanyak 23 kabupaten/kota) sudah memiliki angka harapan hidup di atas angka yang ingin dicapai Jawa Timur pada tahun 2008 (67,75 tahun). Sedangkan 15 daerah yang angka harapan hidupnya masih di bawah 67,75 tahun, yaitu Kabupaten Probolinggo,

Sampang, Situbondo, Pasuruan, Bangkalan, Pamekasan, Jember, Bondowoso, Sumenep, Banyuwangi, Lumajang, Pasuruan, Bojonegoro, Tuban, dan Malang.

#### f. Kematian Ibu Melahirkan

Angka kematian ibu (AKI) sangat berguna untuk menggambarkan pencapaian status kesehatan penduduk. Selain itu juga AKI mengindikasikan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan, kapasitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat, kualitas kesehatan lingkungan, sosial budaya. AKI juga dipengaruhi oleh hambatan dalam memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pada saat melahirkan dan masa nifas.

Data tentang kematian ibu maternal di Jawa Timur masih tercatat dalam jumlah kasus. Pada tahun 2003 tercatat sekitar 446 kasus kematian ibu maternal, dan jumlah ini turun menjadi 326 kasus pada tahun 2008.

Tingginya AKI dipengaruhi oleh penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung yang berkaitan dengan kematian ibu antara lain berkaitan dengan kondisi saat melahirkan seperti pendarahan, hipertensi (tekanan darah tinggi) saat kehamilan, infeksi, dan komplikasi keguguran.

Pemeriksaan kehamilan secara teratur sebenarnya dapat mencegah kematian ibu akibat komplikasi kehamilan. Sedangkan kejadian komplikasi pada ibu dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa sekitar persalinan. Oleh karena itu pemeriksaan kesehatan pada saat hamil dan

kehadiran

kehadiran serta pertolongan tenaga kesehatan yang terampil pada masa persalinan menjadi faktor krusial.

Penyebab tidak langsung dari kematian ibu antara lain adanya anemia dan penyakit menular yang diderita ibu, serta faktor status kesehatan dan gizi ibu yang kurang baik. Faktor lain yang juga mempengaruhi kematian ibu adalah tingkat pendidikan perempuan, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, rendahnya status sosial ekonomi, faktor budaya, serta kurangnya ketersediaan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana (KB).

Tabel 2.8  
Persentase Penyebab Kematian Ibu Maternal  
Provinsi Jawa Timur, Tahun 2003-2008

Tahun	Perda- rahan	Infeksi Jalan Lahir	Keracunan Kehamilan	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2003	34,67	5,90	20,75	38,68
2004	39,95	4,83	20,36	34,86
2005	37,05	9,69	16,22	37,05
2006	40,11	4,12	15,93	39,84
2007*)	34,38	6,02	21,20	38,40
2008**)	38,65	5,88	14,18	41,29

Sumber :Dinkes Provinsi Jawa Timur  
Keterangan : \*) Angka Diperbaiki  
\*\*) Angka Sementara

Upaya efektif untuk menurunkan AKI antara lain dengan mengupayakan semua persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan. Pemerintah juga telah melakukan berbagai kebijakan perbaikan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, seperti pelatihan

dukun bayi, pengembangan klinik Kesehatan Ibu dan Anak; pembangunan rumah sakit; pengembangan puskesmas, pondok bersalin desa, dan posyandu; pendidikan dan penempatan bidan di desa; dan penggerakan masyarakat untuk penyelamatan ibu hamil dan bersalin. Namun demikian upaya tersebut belum memberikan hasil seperti yang diharapkan.

g. Persalinan oleh Tenaga Medis

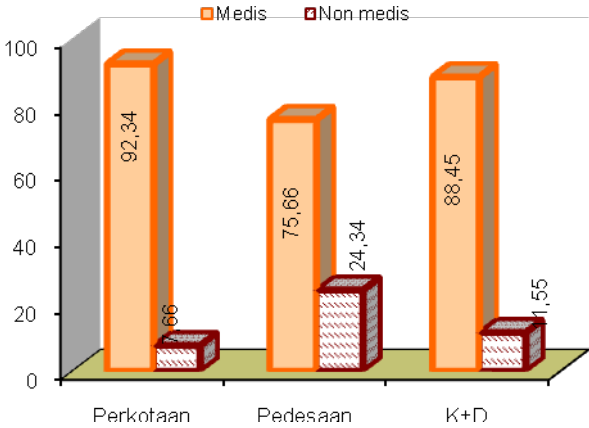
Data Susenas tahun 2008 menunjukkan bahwa cakupan persalinan oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya) pada balita (usia 0-4 tahun) di Jawa Timur mencapai sekitar 88,45 persen. Ini berarti masih

terdapat sekitar 11,55 persen masyarakat di Jawa Timur yang memanfaatkan jasa non medis (dukun bayi atau famili) dalam membantu proses persalinan.

Pada daerah pedesaan persentase penolong persalinan oleh tenaga medis pada umumnya lebih rendah

dibandingkan

Gambar 2.8  
Persentase Penolong Persalinan (Pada Balita),  
Tahun 2008\*)

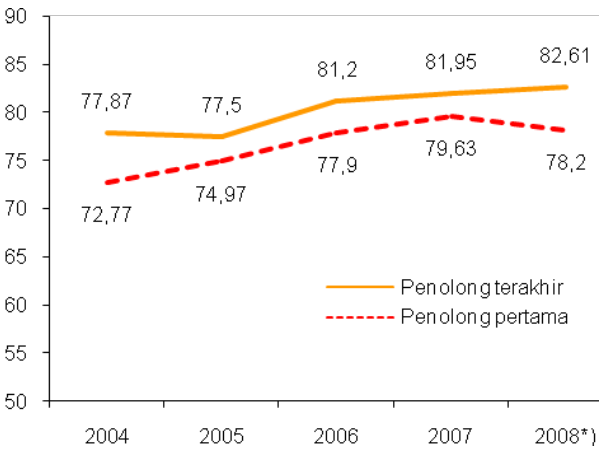


Sumber :BPS Provinsi Jawa Timur  
Keterangan : \*) Angka Sementara

dibandingkan daerah perkotaan. Penolong persalinan oleh tenaga non medis di daerah pedesaan masih tercatat sekitar 24,34 persen, dan tenaga non medis yang paling berperan adalah dukun bayi. Walau demikian angka tersebut sudah menunjukkan penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya (25,51 persen pada 2007). Sedangkan penolong persalinan oleh tenaga medis lebih banyak dipilih oleh penduduk di daerah perkotaan, yaitu sekitar 92,34 persen (pada 2007 sekitar 91,42 persen).

Untuk penolong persalinan oleh non medis didominasi oleh dukun bayi. Hal ini jelas cukup mengkhawatirkan, jika dukun bayi tersebut hanya mengandalkan ketrampilan dan pengalaman mereka dalam menolong persalinan tanpa dibekali dengan pengetahuan yang cukup mengenai kesehatan terutama kesehatan reproduksi. Apabila diperhatikan menurut Kabupaten/Kota, penolong persalinan oleh tenaga medis di Jawa Timur pada tahun 2008 menunjukkan angka sekitar 83,71 persen. Di daerah perkotaan sebagian besar sudah menunjukkan angka di atas 90 persen. Ada sebanyak 10 daerah yang masih menunjukkan di bawah angka Jawa Timur (83,71 persen), bahkan beberapa daerah yang perlu mendapat perhatian karena angka persalinan oleh tenaga medisnya masih cukup rendah (di bawah 70 persen), yaitu Kabupaten Jember, Bondowoso, Probolinggo, Situbondo, dan daerah Pulau Madura.

Gambar 2.9  
Persentase Penolong Persalinan (Pada Balita)  
Oleh Tenaga Medis, Tahun 2004-2008\*)



Tabel 2.9  
Persentase Penolong Persalinan (Pada Balita) di Jawa Timur,  
Tahun 2007-2008

Tahun	Dokter	Bidan	Medis Lain	Dukun	Famili dan Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2007	16,12	65,51	0,32	16,93	1,12
2008*)	18,22	65,24	0,11	15,28	0,15

Sumber Data : BPS, Susenas 2007-2008  
Keterangan : \*) Angka Sementara

Persentase terbesar penolong persalinan oleh tenaga medis adalah bidan, kemudian disusul dokter dan tenaga medis lainnya. Hal ini kemungkinan

karena tempat praktek bidan lebih dekat dengan tempat tinggal pasien sehingga lebih mudah menghubunginya, penyebab lainnya adalah faktor biaya yang akan dikeluarkan relatif lebih murah dibandingkan bila harus ditangani

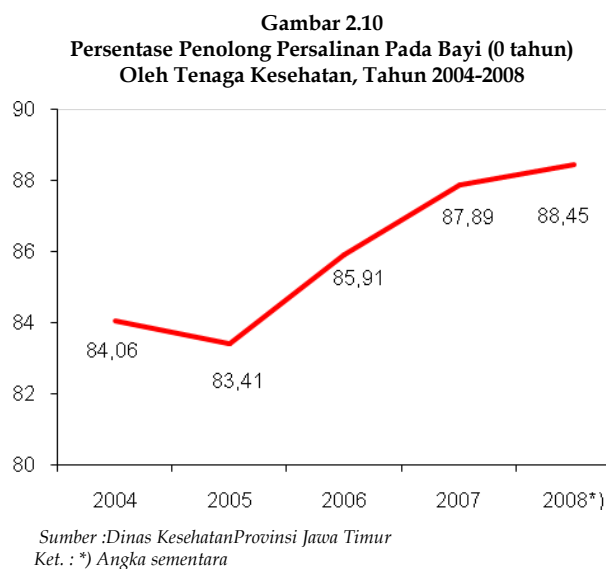
oleh

oleh dokter. Walaupun demikian ada sedikit pergeseran angka, ada sedikit peningkatan persentase penolong persalinan oleh dokter dan penolong persalinan oleh bidan selama persentase mengalami penurunan.

Data tentang penolong persalinan yang dicatat oleh Dinas Kesehatan menunjukkan perbedaan dengan hasil penghitungan yang dilakukan BPS. Hal ini dikarenakan, data yang tercatat di Dinkes adalah penolong persalinan pada bayi usia 0 tahun (0-11 bulan), sedangkan data BPS adalah penolong persalinan pada balita (usia 0-4 tahun).

Selama empat tahun terakhir angka persalinan pada bayi oleh tenaga kesehatan

menunjukkan peningkatan. Dari seluruh bayi yang lahir selama tahun 2008, tercatat 88,45 persen proses persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan.



#### **h. Indeks Daya Beli**

Pada tahun 2003, IDB masyarakat Jawa Timur sebesar 111,48 atau tumbuh sebesar 7,13 persen. Di tahun 2004 IDB Jawa Timur kembali mengalami peningkatan yang cukup

menggembirakan yaitu mencapai 119,20 atau mempunyai laju pertumbuhan sebesar 6,93 persen dibanding data tahun 2003. Hal ini disebabkan tingkat inflasi di tahun tersebut masih lebih rendah dari pertumbuhan PDRB per kapita 2004.

Indeks Daya Beli tahun 2005 kembali mengalami peningkatan meskipun pertumbuhannya lebih lambat dari tahun sebelumnya. Pada tahun itu IDB mencapai 121,68 poin, atau tumbuh sebesar 2,08 persen dibanding data tahun 2004. Perlambatan pertumbuhan IDB pada tahun itu akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa pada momen Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 2006 yang waktunya berdekatan. Kondisi itu diperparah dengan adanya kenaikan harga BBM yang membuat IHK (perubahan harga barang dan jasa) secara kumulatif pada tahun 2005 cukup besar sehingga berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

indeks

Indeks Daya Beli pada tahun 2006 mencapai 132,22 atau mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan yaitu sebesar 8,66 persen dibanding tahun 2005. Naiknya daya beli masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa pada tahun 2006 disebabkan mulai pulihnya perekonomian di Indonesia secara umum.

Selanjutnya pada tahun 2007, secara signifikan IDB masyarakat Jawa Timur mencapai 140,35 atau meningkat 6,15 persen. Pemerintah nampaknya sadar bahwa pertumbuhan ekonomi masih terlalu rentan untuk menerima kejutan-kejutan negatif, seperti kenaikan harga BBM, komoditas-komoditas di mana input antaranya secara langsung terkena imbas kenaikan harga BBM, sementara output produksinya dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Tabel 2.10  
Indeks Daya Beli Jawa Timur Menurut Tahun Dasar 2000 (2000 = 100)  
Tahun 2003 – 2008

Uraian		2003	2004	2005	2006	2007*)	2008**)
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indeks PDRB Per Kapita (ADHB)	144,66	163,84	192,66	223,49	252,61	291,96
2.	Indeks Harga Konsumen (IHK)	129,77	137,45	158,33	169,03	179,98	197,37
3.	Indeks Daya Beli (IDB)	111,48	119,20	121,68	132,22	140,35	147,92
4.	Laju Pertumbuhan IDB (%)	7,13	6,93	2,08	8,66	6,15	5,40

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur  
Keterangan: \*) Angka Diperbaiki  
\*\*) Angka Sementara

Hal tersebut akan berdampak secara nyata terhadap kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa, dengan kata lain akan terjadi perlambatan IDB jika terjadi kenaikan harga barang dan jasa. Kondisi ini sangat tergambar di tahun 2007, yaitu dinamika ekonomi Jawa Timur terkena dampak krisis energi, sehingga laju IDB tahun 2007 mengalami perlambatan, tidak secepat laju IDB tahun sebelumnya.

Kondisi melambatnya laju IDB kembali terjadi pada tahun 2008. Meskipun IDB meningkat mencapai 147,92; laju pertumbuhan justru mengalami perlambatan tipis daripada tahun sebelumnya yaitu mencapai pertumbuhan IDB sebesar 5,40 persen. Perlambatan daya beli itu disebabkan kenaikan harga minyak dunia hingga mencapai 147 dollar AS per barrel, yang menarik harga-harga barang dan jasa domestik. Kondisi itu juga diperparah secara tidak langsung imbas dari cikal bakal krisis finansial global yang dikenal

**sebagai**

sebagai *subprime mortgage* di negara adi daya Amerika Serikat. Jika kondisi krisis finansial global ini berlanjut, tidak menutup kemungkinan di tahun 2009, IDB akan kembali melambat.

2.2.1.2. Evaluasi Indikator Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial Penting Lainnya

a. PDRB Perkapita

Perkembangan PDRB per kapita tahun dasar 2000 periode tahun 2003 – 2008. Selama 6 (enam) tahun berturut-turut angka tersebut menunjukkan peningkatan. Peningkatan PDRB per kapita disebabkan karena pertumbuhan PDRB ADHB yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk.

Tabel 2.11  
PDRB Per Kapita Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku  
Tahun 2003-2008

Uraian		2003	2004	2005	2006	2007*)	2008**)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	300.610	341.065	403.392	470.627	534.919	621.582
2.	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu jiwa)	36.206	36.270	36.482	36.691	36.896	37.095
3.	PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)	8.303	9.404	11.057	12.827	14.498	16.756

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur  
Keterangan: \*) Angka Diperbaiki  
\*\*) Angka Sementara

Pada tahun 2003 PDRB per kapita Jawa Timur sebesar Rp.8,30 juta, pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp.9,40 juta. Kenaikan harga BBM tahun 2005, ternyata tidak begitu menghambat pergerakan kenaikan PDRB per kapita, sehingga pada tahun itu mampu PDRB perkapita masih sebesar Rp.11,06 juta. Di tahun berikutnya, kedinamisan ekonomi Jawa Timur menciptakan PDRB per kapita yang lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu masing-masing sebesar Rp.12,83 juta (2006), Rp.14,50 juta (2007) dan Rp.16,76 juta (2008).

Pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa nilai PDRB per kapita selalu naik, sementara pada kenyataannya perekonomian suatu daerah dalam kegiatannya selalu menghadapi kendala seperti krisis akibat kenaikan harga BBM. Yang perlu diketahui bahwa nilai PDRB per kapita yang dimaksud di

atas



atas, bukan berasal dari riil pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat, tetapi diperoleh dari penghitungan hasil produksi barang/jasa dari pihak produsen yang terjual/terproduksi dalam suatu wilayah, tanpa melihat siapa yang membeli/menggunakan produk-produk tersebut. Lepas dari sisi kelemahannya, yang ingin ditunjukkan oleh PDRB per kapita adalah indikasi seberapa jauh nilai besaran PDRB bisa dinikmati masing-masing penduduk.

Sebagai contoh, anak yang baru lahir akan ikut serta meramaikan kegiatan ekonomi di wilayahnya, dari kegiatan jasa kesehatan saat melahirkan, industri pakaian bayi, industri makanan dan minuman bayi, industri obat-obatan, dan sebagainya. Setidaknya dengan PDRB per kapita, terindikasi semakin tinggi nilai per kapitanya, semakin dinamis pula kegiatan ekonomi di wilayah tersebut, dan semakin tinggi pendapatan yang mengalir di daerah tersebut.

#### **b. Peranan APBD terhadap PDRB**

APBD Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun pada periode 2004 – 2008 cenderung meningkat. Pada tahun 2005 APBD Provinsi Jawa Timur naik sebesar 15 persen dibanding data tahun sebelumnya. Tahun 2006 naik sebesar 26 persen, kemudian tahun berikutnya ( 2007 ) mengalami kenaikan lagi sebesar 16 persen, sedangkan pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 10 persen. Kenaikan tertinggi terjadi pada periode 2005 – 2006. Kenaikan pada periode tersebut mungkin karena adanya penyesuaian APBD yang diakibatkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Jika dilihat rasio APBD Jawa Timur terhadap PDRB dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan walaupun naiknya rasio tersebut tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan pada periode tersebut terjadi kegiatan ekonomi yang relatif stabil. Pada periode 2004 – 2008 rasio APBD mencapai kisaran 0,86 – 1,11 persen. Hal menunjukkan pada periode tersebut terjadi kegiatan ekonomi di sektor riil yang semakin baik, karena dengan APBD yang cenderung stabil mampu meningkatkan nilai tambah PDRB. Besaran rasio APBD terhadap PDRB pada tahun 2008 tersebut menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Jawa Timur cukup baik karena angka yang dicapai lebih kecil jika dibandingkan dengan standar kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar 1,45 persen.

Tabel 2.12

Tabel 2.12  
APBD Provinsi Jawa Timur  
Serta Peranannya Terhadap PDRB Jawa Timur  
Tahun 2004-2008

Keterangan		2004	2005	2006	2007*	2008**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	341.065.251	403.392.351	470.627.494	534.919.333	621.581.955
2.	APBD se Provinsi Jatim (Juta Rp)	3.516.027	4.045.401	5.106.540	5.940.048	5.358.419
3.	Peranan APBD Provinsi Terhadap PDRB Jatim ADHB (%)	1,03	1,00	1,09	1,11	0,86

Sumber : 1. BPS Provinsi Jawa Timur.  
2. Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur  
Keterangan : \*) Angka Diperbaiki  
\*\*) Angka Sementara

Peranan pemerintah sampai dengan saat ini masih cukup besar, namun besarnya peranan pemerintah bukan hanya dinilai dari besarnya anggaran yang dibelanjakan. Bagi masyarakat Jawa Timur peran pemerintah yang paling berarti adalah dampak positif akibat kebijakan publik yang dibuat. Rasio APBD terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2005 mengalami penurunan hingga mencapai angka sebesar 1,00 persen , tahun berikutnya naik menjadi 1,09 persen, dan pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi 1,11 persen, namun pada tahun 2008 rasio APBD mengalami penurunan hingga mencapai 0,86 persen. Jika peran masyarakat yang disebabkan kebijakan publik yang mengena semakin besar, maka persentase peranan APBD terhadap PDRB ADHB akan terjadi sebaliknya yaitu persentasenya akan menurun.

c. ICOR

Hasil penghitungan *ICOR* selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat di tabel 5.14. Besaran *ICOR* yang dihasilkan pada tahun 2003 sebesar 3,95, tahun 2004 sebesar 2,60, sedangkan tahun 2005 hingga 2007 masing-masing sebesar 3,84; 3,18 dan 3,05. Sementara itu pada tahun 2008 mencapai 3,07. Secara tipikal *ICOR* negara-negara sedang berkembang berkisar antara 2,0 sampai 5,0. Selama 5 (lima) tahun terakhir, *ICOR* Jawa Timur rata-rata per tahun sebesar 3,15. Angka tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata investasi yang ditanamkan cukup efisien.

Angka *ICOR* pada tahun 2008 sebesar 3,07, ini berarti untuk mendapatkan tambahan output sebesar 1 unit diperlukan investasi sekitar 3,07 unit. Sedangkan besaran *ICOR* pada tahun sebelumnya menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 unit output memerlukan investasi sebesar kurang lebih 3,05 unit. Untuk lebih jelasnya pernyataan tersebut di atas dapat diartikan untuk meningkatkan PDRB ADHK sebesar Rp. 1 M pada tahun 2007 diperlukan investasi sebesar Rp. 3,05 M, sementara itu untuk meningkatkan PDRB ADHK sebesar Rp 1 M pada tahun 2008 diperlukan investasi sebesar Rp. 3,07 M.

Kondisi di atas dapat dikatakan bahwa besaran nilai *ICOR* tahun 2008 menunjukkan efisiensi permodalan 2008 tidak sebaik tahun 2007. Kondisi ini tampak dari semakin melambatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2008 yang diduga akibat imbas dari krisis ekonomi global yang sedang terjadi baik secara nasional maupun internasional.

Tabel 2.13  
ICOR Jawa Timur

Tahun	ICOR
(1)	(2)
2003	3,95
2004	2,60
2005	3,84
2006	3,18
2007*	3,05
2008**	3,07

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Meskipun saat ini pertumbuhan ekonomi nampak mulai menggeliat, fundamental ekonomi Indonesia pada umumnya (tidak terkecuali provinsi Jawa Timur) selama ini tetap menjadi perhatian khusus. Selama ini masih terlihat adanya ketidak efisienan kapital di beberapa sektor pembangunan. Ketidak efisienan ini diduga merupakan bagian dari dampak praktek monopoli yang terjadi di beberapa jenis usaha dengan pemberian perlakuan khusus dan proteksi yang berlebihan. Sebagai produsen yang menguasai pasar, tentunya perusahaan-perusahaan yang diduga menguasai monopoli bisa saja menentukan tingkat harga sesuai keinginannya dan cenderung untuk kurang memperhatikan efisiensi penggunaan kapitalnya.

Namun

Namun demikian, setelah terjadi krisis ekonomi, terjadi pula reformasi di beberapa bidang termasuk perbankan dan peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan investasi, impor bahan baku dan lain-lain. Secara tidak langsung perubahan-perubahan ini nampaknya berdampak positif pada perkembangan berbagai sektor usaha di Indonesia. Namun demikian nampaknya tingkat suku bunga yang rendah dan kemudahan impor bahan baku belum mampu menjadi stimulus bagi sektor riil. Selain itu, krisis ekonomi juga telah membawa dampak terjadinya seleksi alam terhadap perusahaan-perusahaan yang efisien dan tidak efisien. Umumnya perusahaan-perusahaan yang mempunyai tingkat efisiensi tinggi (baca : berbahan baku non impor) yang mampu bertahan dalam menghadapi badai krisis ekonomi.

#### **d. ILOR**

Provinsi Jawa Timur sebagai Provinsi yang memiliki penduduk dalam jumlah besar tidak terlepas dari permasalahan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial dan ekonomi. Oleh karena itu Jawa Timur tidak hanya diharapkan mampu memperluas lapangan kerja saja, melainkan juga mampu mensejahterakan penduduknya. Usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan informasi ketenagakerjaan dengan beberapa indikatornya.

Jawa Timur dapat dianggap sebagai barometer perekonomian nasional setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat, dimana kontribusi PDRB Jawa Timur mencapai 15,08 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Perekonomian Jawa Timur ditopang oleh tiga sektor utama yaitu perdagangan, industri, dan pertanian.

Dari perhitungan rata-rata *ILOR* per tahun (dengan Kenaikan Nilai PDRB ADHK tahun 2000), dalam kurun waktu 5 tahun (2001-2005), diperoleh perbandingan antara penambahan tenaga kerja dengan penambahan besaran atau nilai output (*ILOR*) secara rata-rata 0,03.

Selanjutnya pada periode tahun (2002–2006); dan periode (2003–2007) rata-rata besaran *ILOR* adalah 0,01 dan 0,03. Pada periode lima tahun terakhir (2003–2008); rata-rata besaran *ILOR* masih pada posisi 0,03.

Tabel 2.14  
ILOR Jawa Timur Tahun 2003-2008  
(Tahun Dasar 2000)

Tahun	ILOR	
	Per tahun	Rata-rata
(1)	(2)	(3)
2003	0,01	
2004	0,06	
2005	0,02	0,03
2006	0,00	0,01
2007*	0,07	0,03
2008**	0,01	0,03

Sumber : . BPS Provinsi Jawa Timur.  
Keterangan : \*) Angka Diperbaiki  
\*\*) Angka Sementara

Mencermati kondisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa perbandingan antara penambahan penyerapan tenaga kerja dengan penambahan nilai ouput sangat kecil. Besaran *ILOR* setiap tahunnya sangat bervariasi. Nilai *ILOR* tertinggi terjadi pada tahun 2004 dengan angka *ILOR* sebesar 0,06, tahun 2007 dengan angka *ILOR* sebesar 0,07. Sedangkan *ILOR*

terendah terjadi pada tahun 2003, tahun 2006 dan tahun 2008, bahkan pada tahun 2006 angka *ILOR* pada posisi 0,00, artinya kenaikan output pada periode 2006 tidak dibarengi dengan penambahan jumlah tenaga kerja. Sedangkan pada tahun 2003 dan 2008 angka *ILOR* sebesar 0,01.

Pada tahun 2008 angka *ILOR* mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan angka *ILOR* pada tahun 2007. Pada tahun 2007 angka *ILOR* sebesar 0,07, sedangkan pada tahun 2008 menjadi sebesar 0,01. Kondisi ini bisa diartikan bahwa pada tahun 2008, penambahan 100 juta rupiah PDRB hanya diikuti oleh penambahan 1 (satu) orang tenaga kerja. Kondisi ini dimungkinkan mulai diberlakukannya perampangan tenaga kerja di beberapa perusahaan besar akibat terkena dampak krisis keuangan global.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dengan masih rendahnya *ILOR*, berarti masih rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh peningkatan nilai output di wilayah Jawa Timur.

i. **Pertumbuhan Penduduk**

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk yang dihitung dengan menggunakan data dasar hasil Supas (Survei Antar Sensus) tahun 2005, rata-rata pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun cenderung menurun. Untuk periode 2007 – 2008, laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur sebesar 0,54 atau lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya (2006 - 2007). Penurunan jumlah penduduk di Jawa Timur, antara lain disebabkan karena keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan angka kelahiran.

Kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur memiliki tingkat laju pertumbuhan penduduk di atas 1 persen adalah Kabupaten Sidoarjo, Jombang, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Kota Probolinggo.

Berbagai hal juga telah mengakibatkan beberapa kabupaten/kota memiliki laju pertumbuhan penduduk yang rendah. Pertumbuhan penduduk terendah terjadi di Kabupaten Blitar, Kediri, Madiun, Lamongan, Sumenep, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya. Rendahnya pertumbuhan penduduk di Kab. Blitar, Kediri, Madiun, diduga karena letaknya berbatasan dengan wilayah kota, sehingga relatif mudah terjadi perpindahan penduduk antara kedua wilayah tersebut. Perpindahan penduduk antara wilayah kabupaten dan kota yang berdekatan, antara lain karena akses ke fasilitas social di wilayah kota umumnya lebih memadai. Sedangkan untuk Kota Surabaya sebagai ibukota dan sentra kegiatan ekonomi di Jawa Timur yang memiliki faktor penarik untuk menjadi daerah tujuan bagi para pencari kerja, pertumbuhan penduduknya sudah semakin jenuh, hal ini disebabkan karena pendatang pada umumnya mencari domisili di kabupaten/kota sekitarnya.

#### **j. Tenaga dan Sarana Kesehatan**

Jumlah tenaga medis yang berada di unit pelayanan kesehatan (rumah sakit umum dan puskesmas) pada 2008 secara umum mengalami peningkatan sebesar 2,3% dibanding 2007. Juga jumlah tenaga paramedis di unit pelayanan kesehatan meningkat sebesar 3,2%. Rasio jumlah tenaga medis dan paramedis terhadap jumlah penduduk Jawa Timur pada 2007 masing-masing adalah 4.730 dan 1.011. Artinya, setiap satu tenaga medis melayani 4.730 penduduk, dan setiap satu tenaga paramedis melayani 1.011 penduduk.

Jumlah fasilitas kesehatan di Jawa Timur pada 2008 meningkat dibanding 2007. Pada 2008 tercatat terdapat 223 rumah sakit umum; 938 puskesmas; 2.280 puskesmas pembantu; 1.175 puskesmas keliling; 5.425 Pondok Bersalin Desa (polindes); dan 44.636 Pos Pelayanan Terpadu (posyandu). Rasio jumlah puskesmas terhadap penduduk sebesar 1:39.677 jiwa. Rata-rata setiap puskesmas memiliki 1-2 puskesmas pembantu.

Pondok Bersalin Desa merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), keluarga berencana, dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai kemampuan bidan desa. Untuk posyandu, rata-rata setiap desa/kelurahan terdapat lima buah, yang berperan memenuhi kebutuhan kesehatan dasar dan peningkatan status gizi masyarakat. Keberadaan posyandu menyebar sampai tingkat rukun warga dan dusun.

Upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama untuk keluarga miskin dan daerah terpencil, mulai tahun 2006 dilakukan pengembangan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap (Dengan Tempat Perawatan/DTP) sesuai standar. Pembangunan puskesmas DTP diprioritaskan pada puskesmas dengan kunjungan pasien terbanyak, sehingga puskesmas tersebut dapat menjalankan fungsi sebagai pusat rujukan antara yang melayani penderita gawat darurat sebelum dirujuk ke rumah sakit. Pada 2006, pembangunan puskesmas DTP dilakukan terhadap 19 puskesmas di 19 kabupaten/kota, sedangkan pada 2007 untuk 21 puskesmas di 21 kabupaten/kota, yang hingga kini masih dalam proses penyelesaian.

Pada 2007, jumlah kunjungan rawat jalan di puskesmas sebanyak 19.340.858 orang, dan rawat inap puskesmas sebanyak 754.084 orang. Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas dalam mencari pengobatan pada 2007 mencapai 54,40%.

#### **k. Pemakai Narkoba**

Akhlak dan moral masyarakat dapat pula tercermin dari tingkat penyalahgunaan obat-obatan terlarang, narkoba dan zat aditif lainnya. Berbagai program dan kebijakan telah ditelorkan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut.

Pada tahun 2003, jumlah tersangka penyalahgunaan narkoba adalah 971 orang. Kemudian pada tahun 2004 meningkat sebesar 32,03 persen menjadi 1.282 orang. Pada tahun 2005 kembali meningkat tajam sebesar 56,47 persen menjadi 2.006 orang, lalu meningkat lagi sebesar 22,93 persen menjadi 2.466 orang pada tahun 2006. Untuk periode 2007 – 2008 ada sedikit penurunan baik jumlah kasus maupun tersangka. Pada tahun 2007 jumlah tersangka sejumlah 3.008 orang menurun sebesar -6,13% atau turun menjadi 2.266 orang pada tahun 2008. Penurunan tersebut diduga sebagai dampak dari gencarnya operasi narkoba dan sosialisai dampak negatif narkoba yang telah dilakukan.

### **2.3. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2008**

Evaluasi program dan kegiatan pembangunan tahun 2008 sangat terkait erat dengan pengukuran indikator kinerja pembangunan yang merupakan hasil agregat dari kinerja beberapa kegiatan yang dikelompokkan kedalam program-program, yang dibagi kedalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang

terdiri

terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) indikator kinerja pembangunan. Adapun agenda pembangunan Jawa Timur meliputi:

- Agenda Peningkatan Kesalehan Sosial Dalam Beragama.
- Agenda Peningkatan Aksesibilitas Terhadap Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
- Agenda Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Memacu Kewirausahaan.
- Agenda Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan dan Pembangunan Infrastruktur.
- Agenda Optimalisasi Pengendalian SDA, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang.
- Agenda Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban, Supremasi Hukum dan HAM.
- Agenda Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah melalui Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan maka prioritas pembangunan pada tahun 2009 perlu difokuskan pada ***upaya memperkuat "sendi-sendi" Kesejahteraan Masyarakat dan meningkatkan upaya penanganan kemiskinan.*** Hal ini antara lain dapat ditempuh melalui strategi yang diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dengan fokus UMKM serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, antara lain melalui: (1) peningkatan investasi, perdagangan dan pariwisata; (2) peningkatan daya saing industri pengolahan; (3) pemberdayaan koperasi dan UMKM; (4) revitalisasi pengelolaan BUMD; dan (5) revitalisasi pertanian serta , (6) fasilitasi pelayanan sosial dasar yang semakin lebih baik.

## **2.4. ISU STRATEGIS DAN MASALAH MENDESAK**

Dalam segmen sub bab Isu Strategis dan Masalah Mendesak, data base analisa masalah yang menjadi acuan adalah perbandingan absolut Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita /Tahun antar Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang diklasifikasikan kedalam 4 kuadran dengan standar Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita/Tahun Propinsi Jawa Timur.

Daerah - daerah yang ada di kuadran I menggambarkan daerah dengan nilai PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Hal ini terjadi pada Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kota Probolinggo, dimana daerah ini merupakan daerah yang mampu mencapai pertumbuhan yang tinggi dengan

didukung



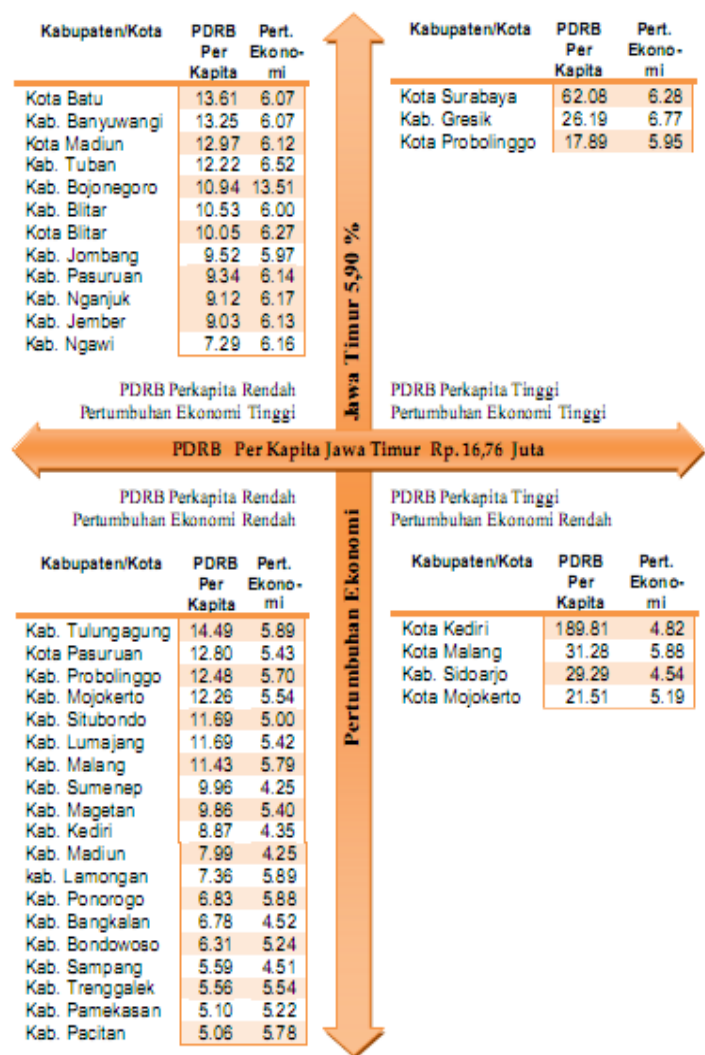
didukung oleh Sektor Industri, Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Sektor Jasa, juga karena dukungan infrastruktur yang sudah cukup baik.

Daerah - daerah yang ada di kuadran II adalah Kota Batu, Kab. Banyuwangi, Kota Madiun, Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab. Jombang, Kab. Pasuruan, Kab. Nganjuk, Kab. Jember, Kab. Ngawi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan PDRB per kapita yang lebih rendah dari rata-rata PDRB per kapita propinsi dengan struktur perekonomian yang tidak didominasi oleh sektor tertentu. Dalam artian bahwa daerah-daerah yang hampir merata pembangunannya di semua sektor ini tinggal menunggu waktu saja untuk terus berkembang dan bergeser ke arah yang ideal.

Daerah kuadran III menunjukkan PDRB per kapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Daerah yang ada di kuadran ini adalah Kab. Tulungagung, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Mojokerto, Kab. Situbondo, Kab. Lumajang, Kab. Malang, Kab. Sumenep, Kab. Magetan, Kab. Kediri, Kab. Madiun, Kab. Lamongan, Kab. Ponorogo, Kab. Bangkalan, Kab. Bondowoso, Kab. Sampang, Kab. Trenggalek, Kab. Pamekasan, Kab. Pacitan.

Daerah kuadran IV merupakan ciri – ciri daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, tetapi PDRB per kapita tinggi. Hal ini terjadi pada Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto dan Kab. Sidoarjo, dimana di Kediri terdapat sebuah perusahaan Industri Rokok berskala nasional yang mendorong tingginya PDRB per kapita, meskipun secara empiris tingginya nilai PDRB per kapita tidak benar-benar mencerminkan tingginya pendapatan masyarakat.

Gambar 2.11  
Perbandingan Capaian Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per kapita  
Tahun 2008 (konstan 2000)



sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, 2008

Namun dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Oleh karena itu rumusan isu strategis dan permasalahan pembangunan di Jawa Timur sampai dengan tahun 2009 ini adalah sebagai berikut :

**A. Rendahnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan**

Seiring dengan berkembangnya arus globalisasi dan informasi yang begitu pesat akan menuntut peningkatan kualifikasi di bidang pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pencipta, pengguna, dan pemanfaat. Hasil pembangunan bidang pendidikan di Jawa Timur menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, hal ini tercatat pencapaian APK SMP/MTs di Jawa Timur sudah Tuntas Paripurna yaitu 96,84%. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur, mulai Tahun Anggaran 2008 mengambil langkah terobosan yang nyata dengan

memulai

memulai merintis Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun (Wajardikmen 12 Tahun). Disamping itu tahun 2009 pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan pilot project pendidikan gratis di dua wilayah yaitu Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bondowoso.

Perkembangan Angka Buta Huruf (ABH) penduduk laki-laki lebih rendah dibanding ABH perempuan. Namun, kesenjangan ABH ini dari tahun ke tahun makin menyempit. Di kalangan penduduk usia 10 tahun ke atas pada 2004 terdapat kesenjangan sekitar 10,52% antara ABH laki-laki dan perempuan, kemudian menurun menjadi 8,76% pada 2008. Data ini sekaligus menunjukkan, peningkatan jumlah penduduk melek huruf di kalangan perempuan mengalami kemajuan signifikan.

Jika dilihat dari kelompok umur, maka secara umum ABH di kalangan penduduk usia 10-29 tahun masih berada di kisaran 2%. Pada kelompok umur ini pula ABH penduduk laki-laki dan perempuan belum terjadi disparitas. Peningkatan ABH secara mencolok terjadi pada kelompok usia 30 tahun ke atas, yang disertai disparitas ABH penduduk laki-laki dan perempuan.

Disparitas ABH di Jawa Timur pada 2008 tidak hanya terjadi pada perbedaan menurut jenis kelamin dan kelompok umur, tapi juga berdasarkan wilayah pedesaan dan perkotaan. Disparitas ABH menurut wilayah terjadi mulai pada kelompok usia 20 tahun. Angka Buta Huruf masih sangat dominan terjadi di wilayah pedesaan.

Dalam bidang kesehatan, Kualitas pelayanan belum optimal karena belum semua sarana pelayanan kesehatan melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Tahun 2008 di Jawa Timur terdapat 223 Rumah Sakit, 938 Puskesmas dan 2.280 Puskesmas Pembantu, berarti setiap Puskesmas melayani 39.677 orang atau belum sesuai standar dimana setiap Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Jumlah tenaga medis yang berada di unit pelayanan kesehatan (rumah sakit umum dan puskesmas) pada 2008 secara umum mengalami peningkatan sebesar 2,3% dibanding 2007. Jumlah tenaga paramedis di unit pelayanan kesehatan meningkat sebesar 3,2%. Rasio jumlah tenaga medis dan paramedis terhadap jumlah penduduk Jawa Timur pada 2007 masing-masing adalah 4.730 dan 1.011. Artinya, setiap satu tenaga medis melayani 4.730 penduduk, dan setiap satu tenaga paramedis melayani 1.011 penduduk.

Perkembangan AKB pada dua tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan dimana pada tahun 2007 mencapai 35,09 per 1.000 kelahiran

hidup dan pada tahun 2008 menurun menjadi 31 per 1000 kelahiran hidup, dan hal ini pada tahun 2010 perlu lebih dipacu penurunannya.

Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2007 sebesar 349 per 100.000 ibu melahirkan hidup dan angka ini pada tahun 2008 menurun menjadi 326 per 100.000 ibu melahirkan hidup, dan hal ini pada tahun 2010 perlu lebih dipacu penurunannya.

Angka Harapan Hidup penduduk Jawa Timur pada tahun 2007 sebesar 68,69 tahun dan pada tahun 2008 sebesar 69,55 meskipun trennya sudah mengalami kenaikan namun perlu terus diupayakan peningkatannya pada tahun 2010 dikarenakan AHH semakin meningkat menjadi indikator meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Angka Harapan Hidup perempuan dari waktu ke waktu menunjukkan angka lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 66,81 tahun untuk laki-laki, dan 70,91 tahun untuk perempuan pada 2008.

Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep merupakan wilayah dengan AHH terendah (di bawah 65 tahun), juga merupakan wilayah dengan Angka Kematian Bayi tertinggi di Jawa Timur.

## **B. Tingkat Kemiskinan, Kesenjangan, dan Pengangguran**

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur walaupun jumlahnya mengalami penurunan namun masih tetap tinggi, pada tahun 2003 sebesar 7.064.289 orang atau 19,52% dan pada tahun 2004 turun menjadi 6.979.565 orang atau 19,10%. Penurunan angka kemiskinan tersebut hanya terjadi di daerah perkotaan, sedangkan di daerah pedesaan relatif tidak berubah. Permasalahan kemiskinan di perkotaan umumnya berkaitan dengan terbatasnya lapangan kerja dan kenaikan upah yang lambat dalam menyesuaikan terhadap kenaikan harga. Stagnasi upah dan peningkatan harga mengakibatkan masyarakat kurang mampu di perkotaan tergolong sebagai penduduk miskin.

Memasuki tahun 2007, angka kemiskinan menjadi sebesar 18,85% hal ini disebabkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Akan tetapi melalui berbagai program pengentasan kemiskinan seperti JPES, maka penduduk miskin pada tahun 2008 turun menjadi 6.294.993 orang (16,97%).

Masih tingginya penduduk miskin ini dinilai semakin memprihatinkan, walaupun Pemerintah Propinsi telah mengeluarkan beberapa program

kemiskinan

kemiskinan seperti Gerdutaskin. Namun capaian melalui program pengentasan kemiskinan belum memenuhi sasaran yang diharapkan, karena sasaran program hanya mengarah pada peningkatan SDM dan bantuan modal usaha sebagai perangsang, namun nilainya masih sangat kecil karena banyaknya kriteria sasaran penduduk yang menyebar di berbagai pelosok Jawa Timur. Selain itu, akibat migrasi ke perkotaan menyebabkan ketimpangan di perkotaan ternyata lebih tinggi dari di pedesaan .

Sementara itu, di Jawa Timur penanganan pengangguran nampaknya menunjukkan hasil yang bagus, hal ini tercatat pada tahun 2006 sebesar 1.575.299 orang atau menurun dibanding tahun 2005 yaitu sebesar 1.646.056 orang. Selanjutnya tahun 2007 turun menjadi 1.366.503 orang serta tahun 2008 turun lagi menjadi 1.296.313 orang. Walaupun terjadi penurunan terhadap jumlah pengangguran akan tetapi tetap harus diwaspadai dan dicari jalan keluar mengenai : (1) Pertambahan Angkatan Kerja yang lebih besar dari pada Lapangan Kerja (2) Rendahnya kualitas dan ketrampilan Tenaga Kerja (3) Kasus-kasus PHK, yang dapat mendorong meningkatnya jumlah angkatan kerja (4) Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan terhadap ketersediaan lapangan kerja (5) Kurangnya Informasi Pasar Kerja dan rendahnya Efektifitas Bursa Kerja karena lemahnya Pendataan serta terbatasnya Jaringan Pelayanan Bursa Kerja dan (6) Adanya pemulangan TKI ilegal dari negara Malaysia maupun negara lain.

### **C. Rendahnya Percepatan Pembangunan Ekonomi berkualitas dan Pembangunan Infrastruktur**

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2008 menunjukkan peningkatan namun perkembangannya masih lambat. Melalui berbagai program yang dilaksanakan belum mampu memberikan hasil yang maksimal. Permasalahan di atas juga ditandai oleh terpuruknya pabrik-pabrik yang memproduksi barang ekspor, semakin meluasnya kebijakan untuk memutuskan hubungan kerja karena kondisi unit usaha terus merugi, semakin meningkatnya angka pengangguran, semakin sempitnya lapangan kerja di daerah, semakin menurunnya produksi industri yang diekspor, semakin tidak mempunyai unit usaha dan lembaga ekonomi dalam mengembangkan produksinya, semakin melemahnya daya saing pengusaha dalam pasar bebas yang disebabkan oleh lemahnya daya saing daerah. Selanjutnya masih terdapat ketimpangan wilayah di Jawa Timur yaitu kawasan selatan Jawa Timur, Madura dan Kepulauan. Pengembangan wilayah ini menjadi prioritas, dan secara politis

akan

akan mendukung rasa persatuan dan kesatuan bangsa, karena pemerataan hasil pembangunan akan terjadi sampai ke pelosok wilayah. Pada pertengahan tahun 2009 Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyelesaikan pembangunan jembatan yang menghubungkan antara pulau Jawa dan Madura, hal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan laju perekonomian masyarakat Jawa Timur.

#### **D. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Ketimpangan Wilayah**

Issue strategis yang saat ini memerlukan perhatian serius adalah pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, terutama konservasi dan rehabilitasi sumber daya lahan dan hutan sebagai akibat kerusakan sumberdaya hutan, maka menyebabkan kerugian ekonomis yang sangat besar dengan terjadinya banjir dan tanah longsor.

Di sisi lain masalah ketimpangan wilayah masih menjadi kendala dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Selain itu terkonsentrasinya kegiatan perekonomian pada wilayah Surabaya dan sekitarnya mengakibatkan ketergantungan wilayah lainnya. Hal ini terbukti dengan putusnya jalur perekonomian akibat lumpur Sidoarjo telah berdampak pada turunnya kinerja perekonomian beberapa daerah di sekitar wilayah Sidoarjo.

#### **E. Bencana Alam**

Propinsi Jawa Timur yang terletak diujung timur pulau Jawa dengan luas ±47.921.98 km terdiri dari beberapa pegunungan berapi yang masih aktif dan dilalui oleh sungai-sungai besar sehingga wilayah ini berpotensi untuk mengalami gunung meletus dan banjir lava/lahar, banjir bandang dan longsor. Selain itu, adanya pertemuan antara lempeng tektonik euro asia dan austro india serta adanya fenomena pemanasan global (global warming) mengakibatkan potensi terjadinya gempa dan dapat menimbulkan tsunami di Selatan Jawa Timur serta terjadinya angin puting beliung di berbagai daerah.

Beberapa kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Timur antara lain sebagai berikut :

- a. Bencana banjir genangan yang terjadi di Kabupaten Pasuruan, Bangkalan, Sampang, Mojokerto dan Gresik merupakan bencana yang diakibatkan oleh meluapnya sungai-sungai besar di sekitarnya.

#### **b. Aktivitas**

- b. Aktivitas Gunung berapi Bromo, Gunung Semeru dan Gunung Lamongan yang masih berstatus waspada.
- c. Luapan lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo.

Saat ini penanganan bencana alam yang dilakukan masih bersifat tanggap darurat, dimana upaya penanganan dilakukan pada saat dan setelah terjadinya bencana serta belum dilaksanakan secara terkoordinasi, baik dalam hal penanganan maupun pendanaan.

Mengingat besarnya potensi daerah rawan bencana di Jawa Timur, antara lain berupa kejadian gunung meletus dan banjir lava/lahar, banjir genangan/bandang dan tanah longsor, tsunami, kebakaran hutan berpotensi, angin puting beliung serta kekeringan, maka diperlukan upaya penanganan secara terpadu, baik meliputi aspek pendanaan maupun pengelolaan yang melibatkan seluruh pihak terkait (pemerintah, swasta dan masyarakat).

#### **F. Kurang Optimalnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Penegakan Supremasi Hukum dan HAM serta Ketentraman dan Ketertiban**

Penerapan otonomi daerah masih menyisakan banyak masalah yang terkait dengan kewenangan dan sinkronisasi kebijakan, selain itu tuntutan otonomi desa semakin menguat. Mengingat desa sebagai satuan pemerintahan wilayah terkecil, selama ini lebih banyak menjadi obyek pembangunan dari pemerintah.

Berkaitan dengan penegakan supremasi hukum dan HAM bahwa Sistem peradilan yang tidak transparan dan terbuka, mengakibatkan hukum belum sepenuhnya memihak pada kebenaran dan keadilan karena tiadanya akses masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan. Kondisi tersebut juga diperlemah dengan profesionalisme dan kualitas sistem peradilan yang masih belum memadai sehingga membuka kesempatan terjadinya penyimpangan kolektif di dalam proses peradilan sebagaimana dikenal dengan istilah mafia peradilan.

Selanjutnya berkaitan dengan masalah ketentraman dan ketertiban dengan beragamnya kondisi sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama yang ada menjadikan Jawa Timur memiliki potensi ancaman yang dapat mengganggu kemanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Potensi ancaman ini harus dapat diminimalkan sehingga tidak menjadi bibit munculnya konflik horizontal dan vertikal serta adanya terorisme.

#### **G. Terbatasnya**

### **G. Terbatasnya Sumber Pembiayaan Pembangunan**

Alokasi dana pembangunan Jawa Timur saat ini masih sangat terbatas, walaupun didukung dengan bagian dana dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat, hingga saat ini masih sekitar Rp. 1,923 trilyun. Jumlah dana riil yang ada masih belum memadai untuk dapat menuntaskan permasalahan pokok yang dihadapi Jawa Timur, lebih-lebih dalam menangani masalah kemiskinan dan pengangguran. Kecilnya dana pemerintah tersebut disebabkan antara lain :

- a. Terbatasnya pembiayaan pembangunan APBN/APBD
- b. Terbatasnya jumlah dana perimbangan ke Propinsi
- c. Belum optimalnya pengelolaan BUMD Propinsi Jawa Timur.

Pengangguran dan kemiskinan, kualitas sumberdaya manusia, kelembagaan, dan lingkungan hidup merupakan kelemahan utama ketahanan perekonomian Jawa Timur. Kondisi ini pada gilirannya dapat berpengaruh negatif pada aspek sosial dan budaya dan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang paling mendasar. Sedangkan ancaman utama pembangunan adalah perkembangan global yang berakibat pada perubahan iklim ekonomi di Jawa Timur. Namun Jawa Timur sebagai salah satu propinsi strategis memiliki kekuatan banyaknya jumlah tenaga kerja, kekayaan sumberdaya alam, keberagaman budaya dan letak geografis yang strategis. Di sisi lain, peningkatan kewenangan bagi pemerintah propinsi (sesuai dengan UU 32 tahun 2004) akan mempermudah pemerintah melakukan fungsi koordinasi. Dengan sejumlah kekuatan ekonomi dan sosial budaya yang dimiliki maka ancaman globalisasi dapat ditanggulangi dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat semakin menguat.

Penyediaan lapangan kerja yang cukup dan pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan Jawa Timur. Salah satu strategi untuk menciptakan lapangan kerja adalah mengundang investasi sebanyak-banyaknya ke Jawa Timur, salah satunya melalui penciptaan iklim investasi yang baik untuk menarik modal luar negeri atau menghambat pelarian modal keluar negeri (*capital flight*). Investasi asing dan domestik dapat ditingkatkan dengan memberikan jaminan hukum dan kepastian kepada investor tanpa harus mengorbankan kepentingan dan hak hukum masyarakat.

Selain itu permintaan tenaga kerja di luar negeri selain sebagai penyumbang devisa yang cukup besar, juga merupakan peluang untuk mengatasi kelemahan yaitu mengurangi tingkat pengangguran. Walaupun dalam kegiatan tersebut perlu diperhatikan hak-hak hukum tenaga kerja kita

yang



yang ada di luar negeri. Pemberian kemudahan dan akses informasi tentang pasar kerja akan meningkatkan peluang kerja di luar negeri.

Secara umum perekonomian Jawa Timur mulai membaik, namun pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di wilayah koridor utara, sedangkan di koridor selatan masih tertinggal yang memerlukan investasi pemerintah baik dalam peningkatan sarana fisik maupun non fisik sebagai upaya mengurangi disparitas antar wilayah.

Selain kesenjangan regional, juga terdapat kesenjangan sektoral. Sektor pertanian yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat kontribusinya lebih rendah dari pada sektor industri dan perdagangan, hotel dan restoran, walaupun masih dalam kategori yang tinggi. Sebagai propinsi lumbung pangan, keberadaan Jawa Timur sangat strategis dalam pemenuhan pangan daerah maupun kebutuhan pangan nasional. Oleh sebab itu perhatian pada sektor pertanian juga harus menjadi prioritas pembangunan dalam rangka revitalisasi pertanian.

Sektor ekonomi strategis Jawa Timur adalah industri pengolahan. Dalam rangka menangkap peluang perdagangan bebas sekaligus mengatasi ancaman produk impor, sektor ini perlu dikembangkan baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Untuk itu diperlukan industri berdaya saing tinggi. Namun demikian pembangunan industri harus juga mempertimbangan aspek wilayah dan lingkungan hidup. Berbagai dampak lingkungan yang dapat mengurangi derajat kesehatan harus dapat ditanggung pemerintah sebagai bagian pemenuhan hak sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sektor Koperasi dan UMKM menyerap tenaga kerja yang cukup besar, walaupun memiliki kontribusi nilai tambah yang lebih kecil dari pada industri skala usaha besar. Untuk itu, UMKM harus mendapat perhatian khusus dalam strategi pembangunan karena sektor ini dapat menjadi sarana pemenuhan kebutuhan dasar. Peningkatan peranan UMKM akan memberikan akses masyarakat terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan dan usaha. Pemenuhan hak atas pekerjaan ini harus disertai dengan penyiapan pendidikan yang lebih berkualitas melalui perbaikan kurikulum baik di lembaga formal maupun non formal.

Diberlakukannya otonomi daerah dan meningkatnya kewenangan daerah sekaligus meningkatkan tanggung jawab yang terkait dengan tujuan otonomi, yaitu berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat akibat meningkatnya tuntutan masyarakat. Besarnya tanggung jawab tersebut tidak

diimbangi

diimbangi oleh kapasitas fiskal yang memadai sehingga memerlukan alternatif pembiayaan. Strategi yang dapat ditempuh adalah meningkatkan pendapatan BUMD. Oleh sebab itu pemerintah harus dapat meningkatkan peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui berbagai format yang dikenal dengan kerjasama antara publik dan swasta (*public-private partnership*) dalam mengelola BUMD. Selain itu dengan semakin besarnya tuntutan reformasi pembangunan maka proses perencanaan pembangunan secara partisipatif perlu terus dikembangkan. Pada kegiatan ini propinsi harus dapat menjadi motivator bagi pemerintah kabupaten Kota. Tentu saja hal ini harus disertai dengan aparatur yang profesional.

Strategi pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kesenjangan antara wilayah surplus dan minus semakin besar. Oleh sebab itu pertumbuhan ini harus dikompensasi dengan strategi pemerataan. Dengan demikian pembangunan ekonomi harus dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh baik bagi peningkatan derajat kesehatan, terpenuhinya kebutuhan pangan, meningkatnya tingkat pendidikan, terpenuhinya kebutuhan air bersih, sumber daya alam dan lingkungan hidup, tersedianya perumahan yang sehat dan serta meningkatnya partisipasi politik dan hak suara atau demokratisasi.

Strategi yang dikembangkan diharapkan mampu membantu pembangunan Provinsi Jawa Timur lebih terarah dan terfokus, berdasarkan kemampuan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Didalam implementasinya, diharapkan proses pembangunan dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Perbaikan tersebut dilakukan dalam kerangka reformasi pemerintahan (*good government*) sebagai asas pelaksanaan semua program pemerintah.